



Kerangka Konseptual Ruang Publik Responsif, Demokratis, dan Bermakna untuk Kota Menengah

Elvie F Mokodongan^{1*}

¹ Program Studi Arsitektur, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie, Kec Tilongkabila Kab Bone Bolango, Gorontalo, Indonesia

Article Info: Submitted: 1 Juni 2026 Reviewed: 8 Juni 2026 Accepted: 30 Juni 2026	Abstract <i>Public spaces in Indonesian secondary cities face challenges including inadequate facilities, unequal access, weak connectivity, poor ecological comfort, and insufficient integration of local identity. This article aims to develop a conceptual framework for public-space quality by integrating responsive, democratic, and meaningful dimensions. The study employs an integrative literature review of foundational theories and recent research on urban vitality, inclusive design, placemaking, ecological comfort, informal economies, and public-space management. The findings show that responsive spaces should meet users' needs for comfort, safety, activity, and adaptability. Democratic spaces require universal access, equitable use, freedom of activity, and community participation. Meaningful spaces are shaped by identity, memory, place attachment, and cultural continuity. These dimensions are strengthened by temporal vitality, spatial integration, local economies, and collaborative management. The resulting Integrated RDM Framework can support the contextual, inclusive, and sustainable assessment, planning, and management of public spaces in Indonesian secondary cities more effectively and equitably.</i>
Keywords: kota menengah; kualitas ruang publik; placemaking; ruang demokratis; ruang responsif	
Koresponden Penulis: Elvie F Mokodongan Program Studi Arsitektur, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Prof. Dr. Ing. B.J Habibie, Kec Tilongkabila Kab Bone Bolango, Gorontalo, Indonesia Email: elvie_mokodongan@ung.ac.id	Abstrak Ruang publik di kota menengah Indonesia menghadapi persoalan berupa keterbatasan fasilitas, ketimpangan akses, lemahnya konektivitas, rendahnya kenyamanan ekologis, serta belum optimalnya penguatan identitas lokal. Artikel ini bertujuan menyusun kerangka konseptual kualitas ruang publik dengan mengintegrasikan dimensi responsif, demokratis, dan bermakna. Kajian menggunakan pendekatan tinjauan literatur integratif terhadap teori dasar dan penelitian mutakhir mengenai vitalitas perkotaan, desain inklusif, <i>placemaking</i>, kenyamanan ekologis, ekonomi informal, dan pengelolaan ruang. Hasil kajian menunjukkan bahwa ruang responsif harus memenuhi kebutuhan kenyamanan, keamanan, aktivitas, dan adaptabilitas. Ruang demokratis memerlukan akses universal, kesetaraan penggunaan, kebebasan beraktivitas, serta partisipasi masyarakat. Ruang bermakna dibentuk oleh identitas, memori, keterikatan tempat, dan kesinambungan budaya. Ketiga dimensi tersebut diperkuat oleh vitalitas temporal, integrasi spasial, ekonomi lokal, dan pengelolaan kolaboratif. Kerangka ini menegaskan hubungan timbal balik antara desain, penggunaan, dan pengelolaan. Kerangka RDM Terintegrasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar penilaian, perencanaan, dan pengelolaan ruang publik kota menengah Indonesia secara kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan. <i>This is an open access article under the CC BY license.</i> 

PENDAHULUAN

Ruang publik merupakan bagian mendasar dari struktur kota karena menjadi wadah bagi pergerakan, interaksi sosial, rekreasi, kegiatan budaya, aktivitas ekonomi, dan ekspresi politik masyarakat. Kedudukannya tidak hanya sebagai ruang fisik di antara bangunan, tetapi juga sebagai infrastruktur sosial yang mempertemukan individu dengan komunitas dan lingkungan perkotaan. Ruang publik yang berfungsi baik dapat mendukung kesehatan, kohesi sosial, rasa aman, kesempatan ekonomi, dan kualitas hidup. Sebaliknya, ruang yang tidak terawat, sulit diakses, atau tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna dapat memperkuat segregasi dan mengurangi kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan kota. (Carr et al. 1992) menempatkan ruang publik sebagai lingkungan bersama yang harus mampu memenuhi kebutuhan, melindungi hak penggunaan, serta memberikan pengalaman yang berarti. Pandangan tersebut kemudian diperkaya oleh kajian yang menghubungkan ruang publik dengan kesejahteraan, keberlanjutan, dan kualitas kehidupan perkotaan (Mouratidis, 2021); (Paudel & Pant, 2023). Oleh karena itu, peningkatan kualitas ruang publik perlu diperlakukan sebagai bagian inti dari pembangunan kota, bukan sebagai penataan lahan sisa atau proyek estetika yang terpisah dari sistem perkotaan.

Keberadaan taman, lapangan, plaza, atau jalur pedestrian belum dengan sendirinya menjamin terbentuknya ruang publik yang berkualitas. Sebuah ruang dapat tersedia secara fisik, tetapi tetap tidak digunakan secara optimal karena terputus dari jaringan pergerakan, tidak nyaman, tidak aman, atau hanya mengakomodasi kelompok tertentu. (Trancik, 1986) menjelaskan kondisi tersebut melalui konsep *lost space*, yaitu ruang yang kehilangan hubungan positif dengan struktur dan aktivitas kota. (Gehl, 2011) selanjutnya menekankan bahwa kualitas ruang kota dapat dibaca melalui kehidupan yang berlangsung di antara bangunan, terutama aktivitas berjalan, berhenti, duduk, melihat, berbincang, dan bermain. Dengan demikian, keberhasilan ruang tidak cukup diukur melalui komposisi bentuk atau kelengkapan elemen, melainkan melalui kemampuan ruang mendukung kehidupan sehari-hari. (Montgomery, 1998) menghubungkan vitalitas tempat dengan perpaduan antara aktivitas, bentuk fisik, dan citra. Kajian kontemporer juga menunjukkan bahwa kualitas ruang publik dipengaruhi oleh aksesibilitas, kenyamanan, keamanan, keragaman fungsi, karakter lingkungan, dan kesinambungan penggunaan pada waktu yang berbeda (El-Kholei & Yassein, 2022); (Mehta, 2014). Berbagai unsur tersebut memperlihatkan bahwa kualitas ruang publik bersifat multidimensional dan relasional.

Kerangka *responsive*, *democratic*, dan *meaningful* yang dikemukakan (Carr et al., 1992) menyediakan dasar yang kuat untuk memahami hubungan multidimensional tersebut. Dimensi responsif berkaitan dengan kemampuan ruang memenuhi kebutuhan pengguna melalui kenyamanan, keamanan, relaksasi, keterlibatan aktif, keterlibatan pasif, dan pengalaman baru. Dimensi demokratis menekankan keterbukaan, kesetaraan akses, kebebasan penggunaan, perlindungan terhadap hak pengguna, dan kemampuan ruang menerima perubahan. Dimensi bermakna merujuk pada identitas, memori, keterikatan, serta hubungan ruang dengan sejarah dan kehidupan sosial masyarakat. Ketiga dimensi tersebut masih relevan, tetapi perkembangan kota menghadirkan isu yang perlu diintegrasikan lebih lanjut, seperti akses universal, kenyamanan termal, ekonomi informal, privatisasi ruang, vitalitas temporal, dan pengelolaan kolaboratif. Ruang yang nyaman tidak selalu demokratis apabila manfaatnya hanya dinikmati kelompok tertentu. Ruang yang terbuka tidak selalu responsif apabila tidak menyediakan fasilitas dasar. Ruang yang menampilkan simbol budaya juga belum tentu bermakna apabila tidak terhubung dengan pengalaman masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan sintesis yang memperlakukan ketiga dimensi sebagai satu sistem.

Kebutuhan terhadap kerangka integratif semakin penting pada kota menengah Indonesia. Kota-kota tersebut menjalankan fungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, pelayanan, dan penghubung wilayah, tetapi kapasitas infrastrukturnya sering tidak berkembang secepat perubahan penggunaan lahan dan pertumbuhan aktivitas. Ruang publik pada kota menengah biasanya memiliki karakter multifungsi karena satu lapangan atau alun-alun dapat digunakan untuk olahraga, upacara, kegiatan keagamaan, pertunjukan budaya, perdagangan temporer, kampanye politik, dan rekreasi keluarga. Fleksibilitas tersebut merupakan potensi, tetapi juga dapat menimbulkan konflik apabila tidak ditunjang oleh sirkulasi, fasilitas, aturan, dan pemeliharaan yang memadai. Selain itu, iklim tropis, aktivitas informal, identitas kota lama, keterbatasan pendanaan, dan kapasitas kelembagaan memerlukan pendekatan yang berbeda dari model ruang publik metropolitan. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa fungsi dan persepsi terhadap ruang publik dipengaruhi oleh kondisi lokal, termasuk hubungan dengan kualitas hidup, partisipasi, komodifikasi, dan praktik penggunaan ruang yang fleksibel (Nasution & Zahrah, 2014); (Panjaitan et al., 2022a, 2022b). Konteks tersebut menuntut kerangka yang cukup komprehensif, tetapi tetap dapat disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Literatur telah membahas vitalitas, aksesibilitas, desain inklusif, identitas tempat, kenyamanan ekologis, dan ekonomi informal, tetapi tema-tema tersebut sering dianalisis secara terpisah. Pemisahan ini dapat menghasilkan intervensi parsial, misalnya memperindah taman tanpa memperbaiki akses, menambahkan fungsi komersial tanpa

melindungi jalur pedestrian, atau mempertahankan bangunan bersejarah tanpa menghubungkannya dengan kehidupan sosial. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya kerangka yang mengintegrasikan kebutuhan pengguna, kesetaraan penggunaan, pemaknaan tempat, hubungan kawasan, dan pengelolaan. Artikel ini bertujuan mengembangkan Kerangka RDM (*Resilience, Diversity, and Morphogenesis*) Terintegrasi bagi ruang publik kota menengah Indonesia melalui tinjauan literatur integratif. Pertanyaan kajiannya adalah: (1) bagaimana hubungan antara dimensi responsif, demokratis, dan bermakna dalam pembentukan kualitas ruang publik; (2) faktor lintas dimensi apa yang diperlukan untuk menerjemahkan kerangka tersebut ke dalam perencanaan dan pengelolaan; serta (3) bagaimana relevansinya bagi kota menengah Indonesia. Kontribusi artikel terletak pada penyusunan sintesis konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar diagnosis, penentuan prioritas, perancangan, dan evaluasi ruang publik secara kontekstual.

TINJAUAN PUSTAKA

Ruang Publik dan Kualitas Kehidupan Perkotaan

Ruang publik merupakan bagian dari struktur kota yang mempertemukan fungsi fisik dengan kehidupan sosial masyarakat. Jalan, lapangan, taman, plaza, jalur pedestrian, dan ruang terbuka lainnya menjadi ruang bersama ketika dapat dicapai, digunakan, dan dimaknai oleh kelompok masyarakat yang beragam. (Carr et al., 1992) menjelaskan bahwa ruang publik menyediakan kesempatan bagi aktivitas rutin maupun spontan, mulai dari bergerak dan beristirahat hingga berinteraksi serta mengekspresikan kehidupan komunitas. Gehl (2011) menempatkan aktivitas manusia di antara bangunan sebagai ukuran penting keberhasilan lingkungan perkotaan. Perspektif tersebut menggeser penilaian ruang dari sekadar komposisi fisik menuju pengalaman pengguna yang terjadi di dalamnya. Ruang yang memiliki bentuk menarik tetapi tidak mendukung kegiatan sehari-hari akan kehilangan peran sosialnya. Sebaliknya, ruang sederhana dapat berkembang menjadi tempat yang bernilai ketika mudah diakses, nyaman, dan digunakan secara berulang. Dengan demikian, kualitas ruang publik perlu dipahami sebagai hubungan antara bentuk, aktivitas, pengguna, dan konteks perkotaan.

Kualitas ruang publik juga berkaitan dengan kemampuan ruang menghindari keterputusan fisik dan fungsional. (Trancik, 1986) menggunakan istilah *lost space* untuk menggambarkan ruang yang tidak terdefinisi, terpisah dari jaringan aktivitas, dan tidak memiliki hubungan positif dengan lingkungan sekitarnya. Kondisi tersebut dapat muncul akibat dominasi kendaraan, pembangunan bangunan sebagai objek yang terpisah, pembagian fungsi yang terlalu kaku, atau peremajaan kawasan yang mengabaikan jaringan pedestrian. (Montgomery, 1998) kemudian menunjukkan bahwa tempat yang hidup terbentuk melalui kombinasi aktivitas, bentuk fisik, serta citra dan makna. Hubungan tersebut menegaskan bahwa penataan internal taman atau lapangan tidak dapat dipisahkan dari koridor, bangunan, transportasi, dan fungsi di sekelilingnya. (Carmona, 2019) menambahkan bahwa kualitas ruang publik dipengaruhi pula oleh proses perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan setelah pembangunan selesai. Oleh sebab itu, kualitas tidak merupakan kondisi statis, tetapi hasil interaksi yang terus berubah antara desain dan penggunaan. Pendekatan multidimensional diperlukan agar ruang tidak hanya baik secara visual, tetapi juga berfungsi secara sosial, ekologis, dan kelembagaan.

Dimensi Responsif, Demokratis, dan Bermakna

Kerangka responsive, democratic, dan meaningful dari (Carr et al., 1992) memberikan dasar untuk menjelaskan kualitas ruang publik melalui tiga pertanyaan utama. Pertama, sejauh mana ruang memenuhi kebutuhan pengguna; kedua, siapa yang dapat mengakses dan menggunakannya secara adil; dan ketiga, bagaimana ruang membentuk identitas serta keterikatan. Dimensi responsif mencakup kenyamanan, relaksasi, keterlibatan aktif, keterlibatan pasif, dan kesempatan memperoleh pengalaman baru. Dimensi ini menuntut kesesuaian antara fasilitas, tata ruang, kondisi lingkungan, dan karakter pengguna. Penyediaan fasilitas dalam jumlah besar tidak otomatis menghasilkan responsivitas apabila fasilitas sulit digunakan, tidak terawat, atau tidak sesuai dengan aktivitas masyarakat. (Mehta, 2014) memperkuat gagasan tersebut melalui evaluasi ruang publik yang menghubungkan inklusivitas, kebermaknaan, keamanan, kenyamanan, dan kesenangan. Responsivitas dengan demikian harus dinilai berdasarkan pengalaman penggunaan aktual, bukan hanya berdasarkan gambar rencana atau daftar fasilitas. Pada kota tropis, dimensi ini juga perlu memasukkan kenyamanan termal, naungan, vegetasi, sanitasi, dan perlindungan terhadap hujan.

Dimensi demokratis berkaitan dengan akses, kebebasan bertindak, kesempatan mengklaim ruang secara sementara, kemampuan ruang menerima perubahan, serta pola kepemilikan dan pengelolaan. Keterbukaan formal belum tentu menghasilkan ruang yang demokratis apabila terdapat hambatan fisik, biaya, pengawasan yang

berlebihan, atau dominasi kelompok tertentu. (Mitchell, 1995) mengingatkan bahwa ruang publik memiliki fungsi demokratis karena menyediakan tempat bagi perbedaan, ekspresi, dan pembentukan kehidupan politik. (Németh dan Schmidt, 2011) menunjukkan bahwa tingkat kepublikan dipengaruhi oleh hubungan antara kepemilikan, pengelolaan, penggunaan, dan karakter pengguna. (Varna dan Tiesdell, 2010) juga menilai kepublikan melalui kepemilikan, pengendalian, kesopanan, konfigurasi fisik, dan pengaktifan ruang. Ketiga pandangan tersebut menegaskan bahwa demokrasi ruang tidak berhenti pada hak masuk. Ruang harus dapat digunakan secara mandiri, aman, dan setara oleh berbagai usia, gender, kemampuan fisik, serta kelompok sosial. Karena itu, desain universal dan aturan penggunaan yang adil menjadi bagian mendasar dari kualitas demokratis.

Dimensi bermakna menjelaskan hubungan antara karakter tempat, pengalaman, sejarah, budaya, dan memori masyarakat. (Lynch, 1960) menunjukkan bahwa citra kota terbentuk melalui elemen yang dapat dikenali dan membantu pengguna membaca lingkungannya. Namun, keterbacaan visual saja belum cukup untuk menciptakan keterikatan. (Francis et al., 2012) menemukan bahwa kualitas ruang publik dapat berhubungan dengan rasa komunitas ketika ruang menyediakan kesempatan berinteraksi dan membangun pengalaman bersama. UNESCO (2011) melalui pendekatan *Historic Urban Landscape* menempatkan warisan perkotaan sebagai susunan nilai fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan ekologis yang saling berhubungan. Pandangan tersebut mencegah pelestarian sejarah hanya berupa pemeliharaan objek atau pemasangan ornamen. Ruang menjadi bermakna ketika unsur sejarah dan budaya hadir dalam aktivitas, orientasi visual, narasi, dan pengalaman sehari-hari. Kebermaknaan juga bersifat dinamis karena masyarakat terus membentuk memori baru melalui penggunaan ruang. Oleh sebab itu, penguatan identitas perlu menjaga kesinambungan masa lalu tanpa menghambat kebutuhan kontemporer.

Vitalitas, Placemaking, dan Kenyamanan Ekologis

Vitalitas merupakan indikator yang menjelaskan kemampuan ruang menarik kehadiran manusia dan mendukung kegiatan yang beragam. (Jacobs, 1961) menekankan pentingnya keragaman fungsi dan pengawasan alami untuk mempertahankan kehidupan jalan. (Montgomery, 1998) menghubungkan vitalitas dengan intensitas aktivitas, keragaman penggunaan, bentuk ruang, serta citra tempat. (Paudel dan Pant, 2023) memperluas pembahasan tersebut dengan menempatkan nilai sosial, kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan budaya sebagai bagian dari vitalitas ruang publik. Keramaian sesaat tidak selalu menunjukkan vitalitas karena dapat muncul akibat kemacetan, keterpaksaan, atau acara temporer. Vitalitas yang berkelanjutan terlihat dari keragaman pengguna, durasi kunjungan, distribusi aktivitas, serta kesinambungan penggunaan menurut waktu. Oleh karena itu, evaluasi perlu membedakan kegiatan rutin dan temporer, aktif dan pasif, serta formal dan informal. Pemrograman kegiatan dan penyebaran titik aktivitas menjadi sama pentingnya dengan penyediaan bentuk fisik. Ruang yang mampu bekerja pada berbagai waktu mempunyai peluang lebih besar untuk tetap relevan dan aman.

Placemaking berperan menghubungkan bentuk fisik dengan penggunaan, identitas, dan partisipasi masyarakat. Proses ini berbeda dari *beautification* karena tidak hanya memperindah ruang, tetapi membangun alasan bagi masyarakat untuk datang, tinggal, berinteraksi, dan kembali. (Carmona, 2021) menjelaskan bahwa produksi tempat melibatkan dimensi morfologis, visual, perseptual, sosial, fungsional, temporal, dan pengelolaan. (Ewing dan Handy, 2009) menunjukkan bahwa kualitas seperti *imageability*, *enclosure*, *human scale*, *transparency*, dan *complexity* dapat memengaruhi pengalaman berjalan kaki. (Dovey dan Pafka, 2020) menambahkan bahwa *walkability* dibentuk oleh hubungan antara kepadatan, keragaman fungsi, dan akses jaringan. Konsep-konsep tersebut memperlihatkan bahwa *placemaking* membutuhkan hubungan antara tata guna lahan, pedestrian, aktivitas tepi bangunan, serta karakter visual. Pada kawasan bersejarah, hubungan ini dapat memperkuat identitas tanpa menjadikan ruang sebagai artefak yang terpisah dari kehidupan masyarakat. Dengan demikian, *placemaking* merupakan proses sosial-spasial yang membutuhkan partisipasi dan pengelolaan berkelanjutan. Keberhasilannya dinilai dari kemampuan ruang menampung kehidupan, bukan hanya dari tampilan setelah proyek selesai.

Kenyamanan ekologis melengkapi vitalitas dan *placemaking*, terutama pada kota beriklim tropis. (Chen dan Ng, 2012) menjelaskan bahwa kondisi termal luar ruang memengaruhi aktivitas serta cara pengguna menilai lingkungan. (Nikolopoulou dan Steemers, 2003) menunjukkan bahwa persepsi kenyamanan dipengaruhi oleh kondisi iklim mikro sekaligus adaptasi psikologis, harapan, dan pilihan pengguna. (Reyes-Riveros et al., 2021) menemukan hubungan antara karakter ruang hijau dan berbagai aspek kesejahteraan manusia. Temuan tersebut menunjukkan bahwa vegetasi tidak cukup dihitung berdasarkan jumlah atau luas, tetapi perlu dinilai berdasarkan fungsi peneduh, pengarah, pembatas, penyerap air, dan pembentuk pengalaman. Material permukaan, unsur air, ventilasi, serta tempat berteduh juga memengaruhi waktu dan durasi penggunaan ruang. Ruang yang terlalu panas atau tidak terlindungi dari hujan akan membatasi akses aktual meskipun secara formal terbuka. Dengan demikian, kualitas ekologis sekaligus mendukung responsivitas dan demokrasi ruang. Integrasi ekologis perlu dipertimbangkan sejak awal perancangan, bukan ditambahkan setelah komposisi ruang ditetapkan.

Ruang Publik dalam Konteks Kota Menengah Indonesia

Kota menengah Indonesia mempunyai karakter berbeda dari kawasan metropolitan karena menjalankan fungsi pelayanan regional sekaligus mempertahankan hubungan yang dekat dengan kehidupan komunitas lokal. Pertumbuhan kota sekunder sering meluas melampaui batas administratif dan meningkatkan tekanan terhadap lahan, jaringan jalan, fasilitas sosial, dan ruang terbuka (Katherina, 2014). Ruang publiknya kerap berada di sekitar pusat pemerintahan, pasar, kawasan kota lama, pusat perdagangan, atau simpul transportasi. Satu lapangan dapat digunakan untuk olahraga, upacara, pertunjukan, kegiatan politik, aktivitas keagamaan, perdagangan temporer, dan rekreasi keluarga pada waktu yang berbeda. Karakter multifungsi tersebut menjadi kekuatan karena memungkinkan penggunaan yang fleksibel. Namun, fleksibilitas dapat menimbulkan konflik apabila tidak disertai pembagian ruang, sirkulasi, jadwal, dan pengelolaan yang jelas. Kapasitas pembiayaan serta pemeliharaan pemerintah daerah juga tidak selalu berkembang secepat perubahan fisik kota. Karena itu, model ruang publik yang mahal, terlalu formal, atau sulit dipelihara belum tentu sesuai bagi kota menengah. Pendekatan kontekstual perlu mengutamakan kebutuhan dasar, adaptabilitas, ekonomi lokal, identitas, dan tata kelola yang realistis.

Kajian di Indonesia memperlihatkan bahwa tingkat kepublikan tidak selalu sama dengan status kepemilikan. (Panjaitan et al., 2022a) menunjukkan bahwa ruang alternatif yang dikelola masyarakat atau pihak nonpemerintah dapat menjalankan fungsi publik selama akses dan manfaat sosial tetap terjaga. (Panjaitan et al., 2022b) juga menjelaskan bahwa produksi dan konsumsi ruang publik Indonesia dipengaruhi oleh demokratisasi, desentralisasi, komodifikasi, dan partisipasi masyarakat. (Nasution dan Zahrah, 2014) menemukan bahwa kualitas ruang terbuka publik berkaitan dengan persepsi kualitas hidup masyarakat di Medan. Temuan-temuan tersebut menegaskan pentingnya membaca kebiasaan lokal, aktivitas informal, kemampuan pengelolaan, dan persepsi pengguna. Kerangka yang digunakan pada kota menengah harus cukup umum untuk mendukung evaluasi, tetapi cukup fleksibel untuk menampung variasi sosial dan budaya. Dimensi responsif, demokratis, dan bermakna menyediakan dasar tersebut ketika dipadukan dengan vitalitas temporal, integrasi spasial, ekonomi lokal, serta pengelolaan kolaboratif. Sintesis inilah yang menjadi dasar analisis pada bagian hasil dan pembahasan. Dengan demikian, tinjauan pustaka tidak hanya merangkum teori, tetapi menetapkan hubungan konseptual yang akan dikembangkan menjadi Kerangka RDM Terintegrasi.

METODOLOGI

Artikel ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur integratif. Pendekatan tersebut dipilih karena tujuan kajian bukan menghitung besaran efek atau melakukan meta-analisis, melainkan menghubungkan teori dasar dengan temuan penelitian kontemporer untuk menghasilkan konstruksi konseptual. Tinjauan integratif memungkinkan penggunaan sumber dengan pendekatan dan jenis bukti yang berbeda selama relevan dengan pertanyaan kajian. Prosesnya diarahkan pada identifikasi konsep, perbandingan perspektif, pengelompokan tema, dan sintesis hubungan antarkonsep. Artikel ini tidak diposisikan sebagai *systematic literature review* berbasis PRISMA karena penelusuran tidak bertujuan mengklaim cakupan seluruh publikasi yang tersedia. Meskipun demikian, prosedur pencarian dan sintesis tetap dirumuskan secara transparan agar alur pembentukan kerangka dapat ditelusuri.

Sumber kajian terdiri atas buku akademik, artikel jurnal, dan dokumen institusional yang membahas ruang publik, perancangan kota, vitalitas, aksesibilitas, desain inklusif, *placemaking*, kenyamanan ekologis, ekonomi informal, partisipasi, kepublikan ruang, dan kota menengah. Literatur klasik digunakan ketika memiliki kedudukan sebagai teori dasar, terutama karya (Jacobs, 1961), (Lynch, 1960), (Trancik, 1986), (Carr et al., 1992), (Montgomery, 1998), dan (Gehl, 2011). Literatur kontemporer diprioritaskan untuk mengembangkan indikator dan membaca perubahan isu, seperti inklusivitas, kesejahteraan, kenyamanan termal, privatisasi, dan pengelolaan. Kata kunci yang digunakan dalam penelusuran meliputi *public-space quality*, *responsive public space*, *democratic public space*, *meaningful public space*, *urban vitality*, *inclusive public space*, *placemaking*, *walkability*, *urban green space*, *informal economy*, *publicness*, *secondary cities*, dan *Indonesian public space*. Pemilihan sumber didasarkan pada relevansi substantif, kejelasan metode, kontribusi konseptual, serta keterkaitan dengan konteks kota menengah dan negara berkembang.

Analisis dilaksanakan melalui empat tahap. Pertama, setiap sumber dibaca untuk mengidentifikasi konsep, definisi, indikator, temuan, dan keterbatasan yang berkaitan dengan kualitas ruang publik. Kedua, unsur yang ditemukan dikelompokkan ke dalam dimensi responsif, demokratis, bermakna, atau faktor lintas dimensi. Ketiga, hubungan dan potensi tumpang tindih antarkategori dibandingkan. Sebagai contoh, kenyamanan ditempatkan dalam dimensi responsif, tetapi pengaruhnya terhadap akses aktual juga dibaca sebagai hubungan dengan dimensi demokratis. Keempat, hasil perbandingan disintesis menjadi Kerangka RDM Terintegrasi yang terdiri atas tiga

dimensi inti dan empat faktor penggerak. Kerangka tersebut kemudian diuji secara argumentatif melalui ilustrasi konseptual pada Kawasan Taruna Remaja Gorontalo berdasarkan dokumen penelitian periode 2009–2011. Ilustrasi ini tidak digunakan untuk generalisasi empiris atau menggambarkan kondisi terkini, melainkan untuk menunjukkan bagaimana temuan lapangan dapat diterjemahkan ke dalam kategori dan prinsip kerangka.

Untuk menjaga konsistensi analisis, setiap tema dinilai melalui tiga pertanyaan: kebutuhan apa yang harus dipenuhi, hak siapa yang perlu dilindungi, dan makna apa yang perlu dipertahankan atau dibentuk. Pertanyaan pertama mengarahkan analisis pada responsivitas, pertanyaan kedua pada demokrasi ruang, dan pertanyaan ketiga pada kebermaknaan. Faktor lintas dimensi diidentifikasi ketika suatu isu memengaruhi lebih dari satu dimensi sekaligus. Vitalitas temporal, misalnya, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan aktivitas, distribusi kesempatan menggunakan ruang, dan pembentukan pengalaman berulang. Integrasi spasial menghubungkan akses, fungsi, citra, dan jaringan aktivitas. Ekonomi lokal dapat menjadi daya tarik sekaligus sumber konflik penggunaan. Pengelolaan kolaboratif menentukan keberlanjutan seluruh dimensi. Hasil analisis disajikan melalui uraian tematik, tabel sintesis, dan diagram hubungan konseptual.

Tabel 1. Tahapan Tinjauan Literatur Integratif

Tahap	Proses	Keluaran
1	Identifikasi konsep dan indikator	Daftar konsep mengenai kebutuhan, hak penggunaan, identitas, vitalitas, konektivitas, ekonomi, dan pengelolaan.
2	Pengelompokan tematik	Klasifikasi ke dalam dimensi responsif, demokratis, bermakna, dan faktor lintas dimensi.
3	Perbandingan perspektif	Pemetaan persamaan, perbedaan, irisan, serta kemungkinan ketegangan antarkonsep.
4	Sintesis konseptual	Kerangka RDM Terintegrasi dan tahapan penerapannya bagi kota menengah Indonesia.

Sumber: sintesis penulis, 2026

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Konsep dan Kesenjangan Integrasi

Perkembangan teori ruang publik menunjukkan pergeseran dari pendekatan yang berorientasi pada bentuk menuju pendekatan yang menggabungkan bentuk, aktivitas, pengalaman, dan tata kelola. Pendekatan morfologis menekankan batas ruang, hubungan massa bangunan, sirkulasi, keterbacaan, dan kontinuitas. (Lynch, 1960) mengemukakan pentingnya jalur, tepi, distrik, simpul, dan penanda dalam membentuk citra kota, sedangkan (Trancik, 1986) menunjukkan bahwa kegagalan menghubungkan bangunan dan ruang luar dapat menghasilkan *lost space*. Perspektif tersebut penting karena ruang publik memerlukan struktur yang terbaca dan akses yang jelas. Namun, penataan bentuk saja tidak menjamin terbentuknya kehidupan publik. (Jacobs, 1961) menekankan keragaman fungsi dan pengawasan alami, sementara (Gehl, 2011) memperlihatkan bahwa kualitas kota tercermin pada kesempatan untuk berjalan, berhenti, duduk, dan berinteraksi. (Montgomery, 1998) kemudian mengintegrasikan aktivitas, bentuk, dan citra sebagai dasar vitalitas. Perkembangan ini menunjukkan bahwa ruang publik harus dipahami sebagai hubungan antara struktur fisik dan praktik sosial.

Pendekatan evaluatif kontemporer berusaha mengoperasionalkan kualitas ruang melalui indikator yang dapat diamati. (Ewing dan Handy, 2009) merumuskan *imageability*, *enclosure*, *human scale*, *transparency*, dan *complexity* sebagai kualitas desain yang berkaitan dengan pengalaman berjalan. (Mehta, 2014) mengembangkan evaluasi yang memasukkan inklusivitas, kebermaknaan, keamanan, kenyamanan, dan kesenangan. (Varna dan Tiesdell, 2010) menilai kepublikan melalui kepemilikan, pengendalian, konfigurasi fisik, keberadaban, dan pengaktifan ruang. Pendekatan tersebut memperkaya pengukuran, tetapi juga menunjukkan bahwa kualitas ruang tidak dapat direduksi menjadi satu indeks universal. Indikator yang relevan bagi plaza komersial belum tentu sama dengan taman lingkungan atau lapangan kota. Konteks iklim, budaya, pola aktivitas, dan kapasitas pengelolaan memengaruhi arti setiap indikator. Karena itu, kerangka konseptual perlu menyediakan struktur umum sekaligus ruang untuk penyesuaian lokal.

Kesenjangan utama yang ditemukan adalah kecenderungan memisahkan dimensi kebutuhan, hak penggunaan, dan identitas. Kajian kenyamanan sering berfokus pada fasilitas atau iklim mikro tanpa menilai siapa yang dapat menikmatinya. Kajian aksesibilitas dapat berhenti pada ketersediaan jalur tanpa membaca kualitas pengalaman dan rasa memiliki. Sementara itu, pembahasan identitas terkadang terlalu menekankan simbol visual tanpa menghubungkannya dengan aktivitas sehari-hari. Kerangka RDM mengatasi pemisahan tersebut dengan menempatkan responsivitas, demokrasi ruang, dan kebermaknaan sebagai dimensi yang saling bergantung. Kerangka ini juga memerlukan faktor penghubung karena beberapa persoalan tidak dapat ditempatkan hanya dalam satu dimensi. Ekonomi informal, misalnya, dapat memenuhi kebutuhan pengguna, memperluas kesempatan ekonomi, dan memperkuat karakter lokal, tetapi pada saat yang sama dapat membatasi pedestrian apabila tidak dikelola. Dengan demikian, hasil sintesis tidak sekadar menambah indikator, melainkan menjelaskan hubungan dan kemungkinan ketegangan antardimensi.

Ruang Publik yang Responsif

Responsivitas menunjukkan kesesuaian antara ruang dan kebutuhan pengguna. (Carr et al., 1992) menghubungkannya dengan kenyamanan, relaksasi, keterlibatan aktif, keterlibatan pasif, dan penemuan. Lima unsur tersebut menegaskan bahwa ruang responsif harus menyediakan pilihan. Kegiatan aktif meliputi bermain, berolahraga, berdagang, menghadiri pertunjukan, atau mengikuti kegiatan komunitas, sedangkan kegiatan pasif mencakup duduk, mengamati, berbincang, dan menikmati suasana. Pengguna dapat berpindah dari satu bentuk keterlibatan ke bentuk lainnya sesuai usia, tujuan, dan kondisi. Ruang yang hanya menyediakan satu fungsi cenderung membatasi keragaman pengguna dan waktu pemakaian. (Mehta dan Mahato, 2021) menunjukkan bahwa desain serta pengelolaan taman dapat menciptakan peluang penggunaan oleh kelompok beragam atau justru menghasilkan segregasi teritorial. Oleh karena itu, responsivitas perlu dinilai melalui pola penggunaan aktual, bukan hanya daftar fasilitas yang tersedia.

Kenyamanan menjadi prasyarat karena pengguna tidak akan bertahan dalam ruang yang panas, kotor, bising, tidak aman, atau tidak menyediakan tempat beristirahat. Kebutuhan dasar meliputi naungan, tempat duduk, pencahayaan, sanitasi, air minum, tempat sampah, jalur yang aman, dan informasi yang mudah dipahami. Fasilitas tersebut harus diletakkan berdasarkan pola aktivitas dan pergerakan, bukan sekadar memenuhi standar jumlah. Tempat duduk, misalnya, perlu memiliki pilihan orientasi, jarak sosial, paparan matahari, dan kedekatan dengan kegiatan. Pencahayaan harus mendukung visibilitas tanpa menghilangkan kenyamanan. Sanitasi perlu mudah dijangkau dan dapat digunakan oleh beragam kelompok. Responsivitas juga menuntut pemeliharaan, sebab fasilitas yang rusak atau kotor tidak memberikan manfaat meskipun secara administratif tersedia. Dengan demikian, kualitas penggunaan merupakan ukuran yang lebih penting daripada keberadaan fisik semata.

Pada kota tropis, kenyamanan ekologis merupakan unsur utama responsivitas. Suhu tinggi, kelembapan, hujan, dan radiasi matahari memengaruhi waktu kunjungan serta durasi aktivitas. (Chen dan Ng, 2012) menunjukkan bahwa kondisi termal berhubungan dengan aktivitas luar ruang, sedangkan (Nikolopoulou dan Steemers, 2003) menekankan peran adaptasi psikologis dalam kenyamanan. Artinya, kenyamanan tidak hanya ditentukan oleh suhu objektif, tetapi juga ekspektasi, pilihan, pengalaman, dan tingkat kontrol pengguna. Vegetasi peneduh, kanopi, orientasi jalur, ventilasi, material permukaan, dan unsur air perlu dirancang sebagai sistem. (Reyes-Riveros et al., 2021) menemukan bahwa struktur, biodiversitas, dan tingkat kealamian ruang hijau umumnya berhubungan positif dengan kesehatan, keamanan, hubungan sosial, serta kebebasan memilih aktivitas. Namun, ruang hijau yang sulit diakses atau tidak terawat tetap dapat kurang digunakan. Karena itu, kualitas ekologis harus diintegrasikan dengan fungsi sosial dan sirkulasi.

Adaptabilitas merupakan komponen responsif yang penting bagi kota menengah. Lapangan atau alun-alun sering berubah fungsi menurut waktu: olahraga pada pagi hari, aktivitas ekonomi pada sore hari, dan pertunjukan atau pertemuan pada akhir pekan. Fleksibilitas memungkinkan ruang menampung perubahan kebutuhan, tetapi membutuhkan struktur dasar agar aktivitas tidak saling mengganggu. Jalur sirkulasi utama perlu tetap bebas, titik utilitas disediakan untuk kegiatan temporer, dan kapasitas ruang perlu dipahami. Pengaturan waktu dapat menjadi alat penting ketika pemisahan permanen tidak diperlukan. Ruang adaptif juga harus mampu menghadapi perubahan demografi, teknologi, dan kebiasaan penggunaan. Penambahan fasilitas modular dan pengelolaan berbasis evaluasi dapat lebih sesuai daripada pembangunan elemen permanen yang sulit diubah. Responsivitas karena itu bukan hanya kesesuaian pada saat desain dibuat, melainkan kemampuan ruang tetap relevan sepanjang waktu.

Ruang Publik yang Demokratis

Dimensi demokratis berangkat dari pertanyaan mengenai siapa yang dapat mencapai, memasuki, menggunakan, dan memperoleh manfaat dari ruang. Keterbukaan formal belum menjamin demokrasi apabila masih terdapat hambatan fisik, ekonomi, sosial, atau simbolik. (Carr et al., 1992) mengaitkan demokrasi ruang dengan akses, kebebasan bertindak, klaim, perubahan, serta kepemilikan dan pengelolaan. Akses perlu dipahami sebagai rangkaian pengalaman yang utuh sejak perjalanan menuju lokasi hingga penggunaan fasilitas. Jalur pedestrian yang terputus, permukaan licin, perbedaan ketinggian, kendaraan yang mendominasi, dan ketiadaan penanda dapat mengurangi kesempatan penggunaan. (Dovey dan Pafka, 2020) menekankan bahwa walkability terbentuk melalui sinergi kepadatan, keragaman fungsi, dan jaringan akses. Karena itu, ruang publik demokratis tidak dapat dipisahkan dari konektivitas kawasan.

Akses universal memperluas prinsip demokratis dari keterbukaan menuju penggunaan yang mandiri dan bermartabat. Penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, ibu dengan kereta bayi, dan pengguna yang mengalami keterbatasan sementara membutuhkan jalur yang menerus, ramp yang sesuai, permukaan aman, tempat istirahat, serta informasi visual dan taktil. Desain universal tidak boleh diperlakukan sebagai tambahan setelah rancangan selesai. Fasilitas yang hanya dapat dicapai melalui jalur alternatif yang jauh atau tidak nyaman tetap menciptakan ketidaksetaraan. Kesetaraan juga menyangkut biaya dan aturan. Ruang yang tampak publik tetapi seluruh fasilitasnya berbayar dapat membatasi kelompok berpendapatan rendah. Demokrasi ruang dengan demikian mengharuskan tersedianya pilihan aktivitas tanpa kewajiban konsumsi. Prinsip ini tidak menolak fungsi komersial, tetapi menempatkannya sebagai pelengkap dan bukan syarat utama untuk menikmati ruang.

Kebebasan penggunaan perlu diseimbangkan dengan perlindungan hak pengguna lain. Dominasi kendaraan dapat mengurangi hak pejalan kaki, penguasaan pedagang dapat menutup akses, dan acara besar dapat menghilangkan ruang bagi kegiatan sehari-hari. Sebaliknya, aturan yang terlalu ketat dapat mematikan spontanitas, ekspresi budaya, dan interaksi sosial. (Mitchell, 1995) mengingatkan bahwa ruang publik mempunyai dimensi politik karena menjadi tempat masyarakat terlihat dan menyampaikan kepentingan. (Németh dan Schmidt, 2011) juga menunjukkan bahwa kepublikan dipengaruhi oleh hubungan antara kepemilikan, pengelolaan, dan aturan penggunaan. Karena itu, aturan perlu transparan, proporsional, dan tidak diskriminatif. Penggunaan sementara oleh individu atau kelompok harus dimungkinkan selama tidak berubah menjadi penguasaan eksklusif. Demokrasi ruang bukan ketiadaan kontrol, melainkan kontrol yang menjaga keseimbangan kepentingan.

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk demokrasi pada tingkat pengambilan keputusan. (Amstein, 1969) menunjukkan bahwa partisipasi memiliki tingkatan, dari penyampaian informasi hingga kendali warga. Dalam perencanaan ruang publik, konsultasi akan kehilangan makna apabila tidak memengaruhi pilihan desain, program, atau pengelolaan. Masyarakat perlu dilibatkan dalam identifikasi masalah, penetapan prioritas, pengujian alternatif, dan evaluasi setelah pembangunan. (Panjaitan et al., 2022b) memperlihatkan bahwa Reformasi dan desentralisasi meningkatkan perhatian terhadap fungsi sosial-politik ruang publik di kota Indonesia, sekaligus memperkuat partisipasi. Namun, komodifikasi juga berkembang. Partisipasi yang efektif membantu menjaga agar ruang tidak hanya mencerminkan kepentingan pemerintah atau investor. Pada saat yang sama, pemerintah tetap bertanggung jawab menjamin standar dasar dan kepentingan kelompok yang kurang terwakili.

Ruang Publik yang Bermakna

Kebermaknaan muncul ketika ruang dapat dikenali, diingat, dan dihubungkan dengan pengalaman individu maupun kolektif. Identitas tempat dapat berasal dari sejarah, arsitektur, lanskap, pola jalan, kegiatan, bahasa, aroma, suara, dan kebiasaan sosial. (Lynch, 1960) menunjukkan pentingnya keterbacaan dan citra, sedangkan (Montgomery, 1998) menempatkan citra sebagai salah satu unsur pembentuk urbanitas bersama aktivitas dan bentuk. Namun, identitas tidak sama dengan keunikan visual semata. Sebuah ruang dapat tampil berbeda tetapi tidak memiliki hubungan dengan masyarakat. Sebaliknya, ruang sederhana dapat bermakna karena menjadi lokasi pengalaman yang berulang dan hubungan sosial yang kuat. (Carr et al., 1992) menegaskan bahwa hubungan ruang dengan kondisi sosial dan pengalaman pengguna menentukan kebermaknaannya. Karena itu, penilaian perlu melihat apa yang dikenali masyarakat, pengalaman apa yang dianggap penting, dan bagaimana ruang berperan dalam memori kota.

Place attachment atau keterikatan tempat berkembang melalui penggunaan, pengalaman, dan hubungan sosial. (Francis et al., 2012) menunjukkan bahwa kualitas ruang publik dapat berkaitan dengan *sense of community*. Keterikatan tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga dapat mendorong kepedulian, pengawasan sosial, dan partisipasi dalam pemeliharaan. Namun, keterikatan dapat bersifat tidak merata. Kelompok lama mungkin memiliki hubungan kuat dengan ruang, sedangkan pendatang, anak muda, atau kelompok minoritas belum merasa terwakili.

Ruang bermakna perlu mempertahankan memori yang penting tanpa membatasi pembentukan makna baru. Hal ini menuntut proses interpretasi yang inklusif. Narasi sejarah, pemilihan simbol, dan program budaya sebaiknya tidak hanya mewakili satu kelompok. Dengan demikian, kebermaknaan berhubungan erat dengan dimensi demokratis.

Pada kawasan bersejarah, pelestarian perlu menghubungkan warisan fisik dengan kehidupan kontemporer. UNESCO (2011) melalui pendekatan *Historic Urban Landscape* menempatkan kawasan bersejarah sebagai lapisan nilai fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan ekologis. Pendekatan ini menghindari pelestarian yang hanya mempertahankan objek bangunan. Bangunan, ruang terbuka, pandangan, pola jalan, aktivitas, dan tradisi perlu dibaca sebagai satu kesatuan. Fungsi baru dapat diterapkan selama mempertahankan karakter penting dan mendukung keberlanjutan kawasan. Aktivitas budaya, interpretasi sejarah, dan pengalaman pedestrian dapat menjadikan warisan lebih mudah dipahami. Sebaliknya, penambahan ornamen lokal tanpa hubungan dengan fungsi dan narasi hanya menghasilkan identitas dekoratif. Ruang yang bermakna harus memungkinkan masa lalu hadir dalam kehidupan sehari-hari sekaligus memberi tempat bagi memori baru.

Placemaking berfungsi sebagai proses yang menghubungkan bentuk, aktivitas, identitas, dan partisipasi. Proses ini berbeda dari *beautification* karena tidak berhenti pada peningkatan tampilan. *Placemaking* memerlukan pembacaan kebutuhan pengguna, karakter lingkungan, potensi ekonomi, dan kapasitas pengelolaan. (Carmona, 2021) menempatkan ruang publik dalam dimensi morfologis, perseptual, sosial, visual, fungsional, temporal, dan pengelolaan. Integrasi tersebut membantu menjelaskan bahwa makna bukan sesuatu yang ditempelkan setelah rancangan selesai. Makna terbentuk melalui skenario penggunaan dan pengalaman berulang. Pada kota menengah, placemaking dapat memanfaatkan kegiatan lokal, kuliner, kerajinan, perayaan, dan lanskap sebagai sumber identitas. Keberhasilannya ditentukan oleh kemampuan strategi tersebut tetap terbuka bagi kelompok berbeda dan tidak berubah menjadi komersialisasi yang eksklusif.

Faktor Lintas Dimensi

Vitalitas temporal merupakan faktor pertama yang menghubungkan ketiga dimensi. Ruang yang ramai hanya ketika berlangsung festival belum tentu memiliki vitalitas berkelanjutan. Vitalitas perlu dibaca melalui intensitas, keragaman, durasi, distribusi waktu, dan persebaran lokasi aktivitas. (Paudel dan Pant, 2023) menunjukkan bahwa nilai ruang publik mencakup aspek sosial, kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan budaya. Aktivitas rutin memungkinkan interaksi dan pengawasan alami, sedangkan kegiatan temporer dapat menghadirkan pengalaman baru. Keseimbangan keduanya diperlukan. Pemrograman kegiatan dapat mengaktifkan ruang yang sepi, tetapi tidak boleh menghilangkan kesempatan bagi aktivitas spontan. Pengukuran vitalitas juga perlu membedakan keramaian yang produktif dari kepadatan yang menimbulkan konflik. Karena itu, vitalitas tidak diperlakukan sebagai tujuan kuantitatif semata, melainkan sebagai kualitas distribusi kehidupan publik.

Integrasi spasial merupakan faktor kedua. Ruang publik tidak berhenti pada batas tapak, melainkan dipengaruhi oleh koridor, bangunan, transportasi, penggunaan lahan, dan jaringan ruang lainnya. Konektivitas fisik memungkinkan pergerakan, konektivitas visual membantu orientasi, dan konektivitas fungsional menyediakan alasan untuk berjalan dari satu tempat ke tempat lain. (Ewing dan Handy, 2009) menunjukkan bahwa *enclosure, human scale, transparency, complexity, dan imageability* memengaruhi pengalaman pedestrian. (Dovey dan Pafka, 2020) menekankan hubungan antara jaringan akses dan keragaman destinasi. Ruang yang didesain baik tetapi dikelilingi lalu lintas cepat, parkir luas, atau fasad tertutup akan sulit terhubung dengan kehidupan kota. Karena itu, penataan perlu memperhatikan penyeberangan, tepi ruang, fungsi lantai dasar, jarak antaraktivitas, dan kesinambungan vegetasi. Integrasi spasial memperkuat responsivitas, demokrasi, dan kebermaknaan secara bersamaan.

Ekonomi lokal merupakan faktor ketiga. Pedagang makanan, kerajinan, jasa, dan aktivitas informal dapat menyediakan kebutuhan, menciptakan lapangan kerja, memperpanjang waktu kunjungan, dan memperkuat karakter lokal. (Panjaitan et al., 2022a) menunjukkan bahwa ruang alternatif di kota Indonesia dapat menjalankan fungsi publik meskipun tidak sepenuhnya dimiliki pemerintah, selama tetap terbuka dan memenuhi kebutuhan komunitas. Namun, komersialisasi dapat menurunkan kepublikan ketika ruang gratis berkurang atau jalur pedestrian dikuasai. Penataan ekonomi lokal perlu mengatur lokasi, waktu, kapasitas, utilitas, kebersihan, dan akses. Penggusuran menyeluruh dapat menghilangkan sumber vitalitas, sedangkan pembiaran dapat menimbulkan konflik. Pendekatan integratif menempatkan ekonomi lokal sebagai bagian dari desain dan pengelolaan, bukan sebagai gangguan yang ditangani setelah ruang dibangun.

Pengelolaan kolaboratif merupakan faktor keempat dan menjadi syarat keberlanjutan seluruh dimensi. Desain yang baik dapat kehilangan kualitas ketika penerangan tidak berfungsi, vegetasi tidak dirawat, sampah menumpuk, atau aturan tidak ditegakkan secara adil. (Carmona, 2019) menekankan bahwa perencanaan, desain, pengelolaan, dan

pemeliharaan harus dipandang sebagai satu rangkaian. Pengelolaan mencakup pemrograman, perizinan kegiatan, pengaturan pedagang, keamanan, kebersihan, pemeliharaan, dan evaluasi. Kolaborasi dapat melibatkan pemerintah, komunitas, pelaku usaha, kelompok disabilitas, pengelola transportasi, dan warga sekitar. Namun, pembagian peran harus jelas agar partisipasi tidak menjadi alasan untuk memindahkan tanggung jawab publik. Mekanisme pembiayaan juga harus menjaga agar sumber pendapatan tidak menghasilkan eksklusi. Pengelolaan yang adaptif menggunakan data penggunaan dan keluhan untuk memperbaiki ruang secara berkala.

Relevansi bagi Kota Menengah Indonesia

Kota menengah Indonesia memiliki posisi strategis dalam jaringan wilayah karena menjadi pusat pelayanan dan penghubung kawasan perdesaan dengan kota besar. Pertumbuhannya dapat meningkatkan pemerataan, tetapi juga menciptakan tekanan terhadap lahan, infrastruktur, kawasan lama, dan ruang terbuka. (Katherina, 2014) menunjukkan bahwa perkembangan kota sekunder dapat melampaui batas administratif dan membentuk perluasan perkotaan di wilayah sekitar. Dalam kondisi tersebut, ruang publik berperan sebagai pengikat antara pertumbuhan fisik dan kehidupan sosial. Namun, kapasitas pemeliharaan dan pembiayaan tidak selalu mengikuti perkembangan. Strategi yang terlalu kompleks atau mahal berisiko menghasilkan fasilitas yang cepat menurun kualitasnya. Kerangka RDM karena itu perlu diterapkan melalui intervensi yang realistis, bertahap, dan mudah dikelola.

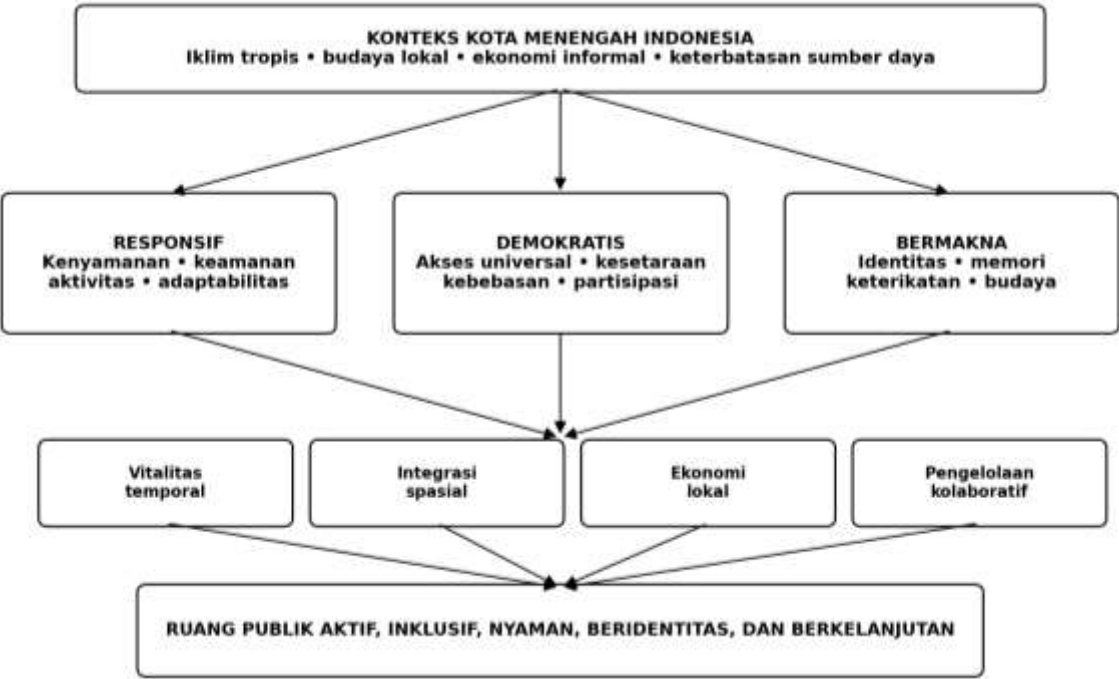
Karakter multifungsi menjadi ciri penting ruang publik kota menengah. Satu ruang dapat digunakan untuk olahraga, upacara, aktivitas ekonomi, hiburan, kegiatan politik, dan acara keagamaan. Fungsi yang berubah menurut waktu menuntut fleksibilitas, penyediaan utilitas, dan pengaturan jadwal. Di sisi lain, pusat kota menengah sering memiliki kedekatan antara lapangan, kantor pemerintahan, pasar, permukiman, bangunan bersejarah, dan koridor komersial. Kedekatan tersebut memberikan potensi integrasi yang kuat. Perbaikan pedestrian, fungsi lantai dasar, penyeberangan, naungan, dan node aktivitas dapat menghasilkan manfaat luas. Namun, intervensi harus mempertimbangkan budaya penggunaan ruang dan tidak memaksakan model yang asing. (Nasution dan Zahrah, 2014) menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap fungsi ruang terbuka berkaitan dengan kualitas hidup. Karena itu, penilaian pengguna merupakan dasar penting untuk menentukan prioritas.

Iklim tropis mengharuskan kenyamanan ekologis ditempatkan sebagai kebutuhan dasar. Pembangunan plaza dengan dominasi perkerasan dapat menghasilkan ruang yang menarik secara visual tetapi sulit digunakan pada siang hari. Vegetasi peneduh perlu dipertahankan dan dikembangkan berdasarkan pola aktivitas. Drainase, resapan, dan perlindungan terhadap hujan juga perlu diintegrasikan. Selain itu, kegiatan informal harus dipahami sebagai bagian dari sistem kota. Penataan perlu menyediakan ruang yang layak tanpa menghambat akses. Identitas lokal dapat diperkuat melalui aktivitas budaya, lanskap, narasi sejarah, kerajinan, dan kuliner, bukan hanya melalui ornamen. Pengelolaan yang melibatkan aktor lokal meningkatkan kemungkinan program terus berlangsung. Dengan demikian, penerapan RDM pada kota menengah bersifat kontekstual: indikator umumnya sama, tetapi bentuk intervensinya mengikuti iklim, budaya, ekonomi, dan kapasitas setempat.

Kerangka RDM Terintegrasi

Hasil utama kajian adalah Kerangka RDM Terintegrasi yang menempatkan responsif, demokratis, dan bermakna sebagai dimensi inti, serta vitalitas temporal, integrasi spasial, ekonomi lokal, dan pengelolaan kolaboratif sebagai faktor penggerak. Kerangka ini tidak menyusun ketiga dimensi secara hierarkis. Setiap dimensi harus dipenuhi secara seimbang karena kekurangan satu dimensi dapat mengurangi nilai dimensi lain. Kenyamanan memperluas akses aktual, akses yang setara memungkinkan pembentukan pengalaman, dan pengalaman berulang memperkuat keterikatan. Rasa memiliki dapat mendorong partisipasi serta pemeliharaan, yang selanjutnya meningkatkan kenyamanan. Hubungan ini menunjukkan adanya lingkaran penguatan. Namun, hubungan negatif juga mungkin terjadi, misalnya komersialisasi yang meningkatkan aktivitas tetapi mengurangi kesetaraan. Kerangka karena itu harus digunakan untuk membaca manfaat sekaligus konsekuensi setiap intervensi.

Kerangka dapat diterapkan melalui lima tahap, yaitu diagnosis, penentuan prioritas, integrasi, implementasi, dan evaluasi. Diagnosis memetakan kondisi fisik, aktivitas, pengguna, akses, identitas, dan pengelolaan. Penentuan prioritas mengutamakan persoalan yang paling memengaruhi keselamatan, akses, dan penggunaan. Tahap integrasi menghubungkan intervensi fisik dengan program aktivitas, ekonomi lokal, dan jaringan kawasan. Implementasi dilakukan bertahap dengan pembagian peran dan sumber pembiayaan yang jelas. Evaluasi menilai perubahan penggunaan, kenyamanan, inklusivitas, identitas, dan pemeliharaan. Siklus evaluasi memungkinkan penyesuaian program tanpa menunggu proyek besar berikutnya. Dengan demikian, RDM bukan hanya tabel indikator, tetapi kerangka proses yang menghubungkan analisis dengan pengambilan keputusan.



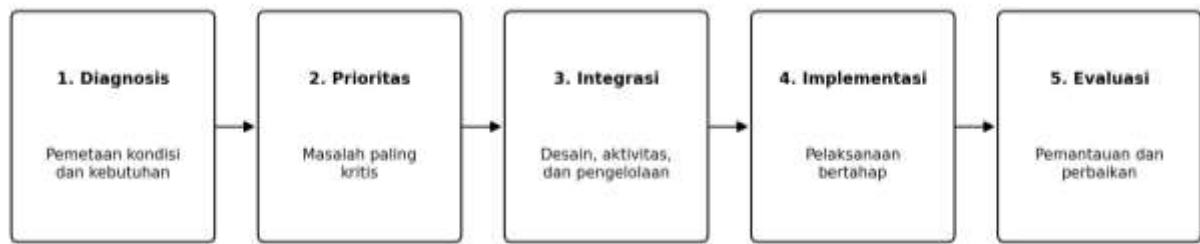
Gambar 1. Kerangka RDM Terintegrasi bagi Ruang Publik Kota Menengah Indonesia

Sumber: sintesis penulis berdasarkan Carr et al. (1992), Carmona (2019, 2021), Mehta (2014), dan Paudel dan Pant (2023).

Tabel 2. Dimensi dan Indikator Kerangka RDM Terintegrasi

Dimensi	Komponen	Indikator utama	Risiko jika diabaikan
Responsif	Kenyamanan	Naungan, tempat duduk, kebersihan, sanitasi, pencahayaan, kenyamanan termal.	Ruang hanya digunakan pada waktu atau kelompok tertentu.
Responsif	Aktivitas dan adaptabilitas	Kegiatan aktif/pasif, rutin/temporer, ruang fleksibel, utilitas kegiatan.	Ruang monoton dan cepat kehilangan relevansi.
Demokratis	Akses universal	Jalur menerus, ramp, permukaan aman, informasi, keterhubungan transportasi.	Kelompok tertentu tidak dapat menggunakan ruang secara mandiri.
Demokratis	Kesetaraan dan partisipasi	Kegiatan gratis, aturan adil, kebebasan penggunaan, keterlibatan masyarakat.	Privatisasi, dominasi, dan keputusan yang tidak sesuai kebutuhan.
Bermakna	Identitas dan memori	Sejarah, budaya, karakter lanskap, kegiatan lokal, narasi, pengalaman berulang.	Ruang generik atau identitas bersifat dekoratif.
Lintas dimensi	Vitalitas temporal	Intensitas, keragaman, durasi, dan distribusi aktivitas menurut waktu.	Ruang hidup hanya saat acara.
Lintas dimensi	Integrasi spasial	Hubungan dengan koridor, bangunan, fungsi sekitar, pedestrian, dan jaringan hijau.	Ruang terisolasi dari kehidupan kawasan.
Lintas dimensi	Ekonomi dan pengelolaan	Penataan usaha lokal, pemeliharaan, pemrograman, pembiayaan, evaluasi.	Konflik penggunaan dan penurunan kualitas pascapembangunan.

Sumber: hasil sintesis penulis, 2026



Gambar 2. Tahapan Penerapan Kerangka RDM Terintegrasi

Sumber: sintesis penulis, 2026.

Ilustrasi Konseptual Kawasan Taruna Remaja Gorontalo

Kawasan Taruna Remaja Gorontalo digunakan sebagai ilustrasi konseptual berdasarkan dokumen penelitian periode 2009–2011. Ilustrasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi terkini. Pada periode penelitian, kawasan mencakup lapangan kota dan koridor di sekitarnya dengan fungsi pemerintahan, hunian, perdagangan, dan jasa. Temuan menunjukkan bahwa kualitas ruang tidak hanya dipengaruhi kondisi internal lapangan, tetapi juga kontinuitas pedestrian, fasad, aktivitas, dan fungsi pada koridor. Persoalan yang diidentifikasi meliputi pemeliharaan yang kurang, sampah, kerusakan jalur pedestrian, penggunaan trotoar oleh kendaraan dan pedagang, tidak tersedianya akses yang memadai bagi difabel, kurangnya vegetasi peneduh, aktivitas yang terkonsentrasi, dan lemahnya hubungan dengan bangunan bersejarah. Rangkaian persoalan ini menunjukkan bahwa ketiga dimensi RDM muncul secara bersamaan.

Dari sisi responsif, keterbatasan tempat duduk, naungan, penerangan, kebersihan, fasilitas, dan keragaman kegiatan mengurangi kenyamanan serta pilihan penggunaan. Aktivitas olahraga, rekreasi, budaya, politik, dan keagamaan telah berlangsung, tetapi banyak bergantung pada acara tertentu dan tidak tersebar merata. Dari sisi demokratis, jalur yang rusak atau terhalang mengurangi kesempatan berjalan, sedangkan ketiadaan akses universal membatasi kelompok tertentu. Kehadiran PKL menunjukkan kebutuhan ekonomi dan pelayanan, tetapi tidak tersedianya ruang khusus menimbulkan konflik dengan pedestrian. Dari sisi bermakna, kawasan memiliki sejarah dan bangunan preservasi, tetapi belum terhubung kuat dengan pengalaman ruang dan kegiatan sehari-hari. Analisis ini memperlihatkan bahwa intervensi tunggal, misalnya perbaikan taman, tidak cukup menyelesaikan keseluruhan persoalan.

Konsep pengembangan dalam studi tersebut mengarah pada penghubungan lapangan dengan koridor, penambahan aktivitas komersial lokal, penguatan fungsi sosial-budaya, penataan vegetasi, dan penggunaan elemen sejarah. Tema kuliner tradisional, kerajinan, relaksasi, olahraga, sosial-budaya, dan lingkungan alami digunakan untuk menyebarkan aktivitas. Dalam kerangka RDM, strategi tersebut dapat dibaca sebagai upaya meningkatkan responsivitas melalui keragaman fungsi, demokrasi melalui konektivitas dan kebebasan penggunaan, serta kebermaknaan melalui identitas sejarah dan budaya. Namun, efektivitasnya tidak dapat dinyatakan tanpa evaluasi pascaimplementasi. Keterbatasan ini penting karena simulasi desain bukan bukti bahwa intervensi akan otomatis berhasil. Ilustrasi Taruna Remaja terutama menunjukkan kegunaan RDM dalam menerjemahkan temuan masalah menjadi prinsip yang terintegrasi.

Pelajaran dari ilustrasi tersebut adalah pentingnya menetapkan batas analisis yang lebih luas daripada batas tapak. Lapangan kota berfungsi dalam jaringan koridor dan aktivitas. Penguatan ekonomi lokal harus disertai ruang pedestrian yang jelas. Identitas sejarah perlu dihubungkan dengan orientasi, program, dan pengalaman, bukan hanya simbol. Vegetasi peneduh harus ditempatkan pada lokasi aktivitas dan jalur utama. Program kegiatan perlu mengisi waktu yang berbeda tanpa menghilangkan ruang spontan. Pengelolaan harus direncanakan bersamaan dengan desain. Prinsip-prinsip ini relevan bagi banyak kota menengah, tetapi bentuknya perlu disesuaikan dengan kondisi lokal dan data mutakhir.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, Kerangka RDM Terintegrasi memperluas tiga dimensi (Carr et al., 1992) dengan menjelaskan faktor penghubung dan potensi ketegangan antardimensi. Responsivitas tidak dibatasi pada fasilitas, tetapi mencakup kenyamanan ekologis dan adaptabilitas. Demokrasi ruang tidak berhenti pada akses, tetapi meliputi distribusi manfaat, perlindungan hak, dan partisipasi. Kebermaknaan tidak hanya berkaitan dengan simbol, tetapi dengan aktivitas, memori, dan kesinambungan budaya. Vitalitas, integrasi spasial, ekonomi lokal, dan pengelolaan

menjelaskan bagaimana ketiga dimensi diterapkan dalam sistem kota. Kerangka ini juga menghindari asumsi bahwa semua indikator dapat dijumlahkan secara sederhana. Beberapa keputusan menghasilkan *trade-off* yang perlu didiskusikan secara transparan.

Secara praktis, kerangka dapat digunakan pemerintah daerah sebagai alat diagnosis dan penentuan prioritas. Kebutuhan dasar seperti akses, keselamatan, naungan, tempat duduk, sanitasi, kebersihan, dan pencahayaan sebaiknya ditangani sebelum intervensi monumental. Setelah itu, keragaman aktivitas, ekonomi lokal, dan identitas dapat dikembangkan melalui program yang terintegrasi. Perancang dapat menggunakan kerangka untuk memastikan bahwa setiap elemen fisik memiliki hubungan dengan kebutuhan dan hak pengguna. Komunitas dapat menggunakannya untuk menyampaikan pengalaman dan memantau perubahan. Pengelola dapat menyusun indikator operasional, seperti kontinuitas jalur, distribusi naungan, keragaman pengguna, waktu penggunaan, jumlah kegiatan gratis, kondisi fasilitas, dan keterlibatan masyarakat. Evaluasi berkala memungkinkan perbaikan kecil yang lebih cepat dan murah.

Kerangka ini masih bersifat konseptual dan memerlukan pengujian empiris. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan observasi perilaku, survei persepsi, audit aksesibilitas, pengukuran kenyamanan termal, analisis konektivitas, pemetaan aktivitas menurut waktu, dan evaluasi tata kelola. Pengujian pada beberapa kota menengah diperlukan untuk membedakan indikator umum dari indikator kontekstual. Metode campuran dapat menghubungkan data objektif dengan pengalaman pengguna. Penelitian longitudinal juga penting untuk menilai perubahan setelah intervensi. Hasil pengujian dapat digunakan untuk mengembangkan bobot atau sistem penilaian, tetapi proses tersebut harus menghindari penyederhanaan berlebihan. Tujuan utama kerangka tetap menyediakan cara berpikir integratif agar keputusan desain dan pengelolaan tidak parsial.

Keterbatasan dan Agenda Penelitian

Kerangka RDM Terintegrasi dibangun melalui sintesis konseptual sehingga belum dapat diperlakukan sebagai instrumen pengukuran yang telah tervalidasi. Pengelompokan indikator ke dalam tiga dimensi membantu menyusun argumentasi, tetapi batas antardimensi tidak selalu tegas. Kenyamanan, misalnya, ditempatkan dalam dimensi responsif, tetapi kondisi yang tidak nyaman juga dapat membatasi akses aktual dan dengan demikian memengaruhi demokrasi ruang. Identitas dapat memperkuat keterikatan, tetapi juga dapat menimbulkan eksklusi apabila hanya mewakili sejarah atau kelompok tertentu. Ekonomi lokal dapat meningkatkan vitalitas, tetapi berpotensi mengurangi ruang bebas konsumsi. Hubungan semacam ini menunjukkan bahwa penerapan kerangka memerlukan penilaian kualitatif dan dialog antarpemangku kepentingan, bukan sekadar pemberian skor. Bobot indikator juga tidak dapat ditentukan secara universal tanpa pengujian pada konteks yang berbeda.

Keterbatasan lain berkaitan dengan penggunaan ilustrasi Taruna Remaja yang berasal dari dokumen penelitian periode 2009–2011. Data tersebut berguna untuk menunjukkan bagaimana masalah empiris dapat dikelompokkan dan diterjemahkan menjadi prinsip, tetapi tidak dapat digunakan untuk menilai kondisi kawasan pada masa kini. Perubahan fisik, aktivitas, kebijakan, kepemilikan, dan pola pengelolaan yang mungkin terjadi setelah periode tersebut memerlukan penelitian lapangan baru. Ilustrasi juga berasal dari satu kawasan sehingga tidak mewakili seluruh variasi kota menengah Indonesia. Kota pesisir, kota pegunungan, kota industri, kota pendidikan, dan kota wisata dapat mempunyai struktur aktivitas, tekanan lingkungan, serta kapasitas kelembagaan yang berbeda. Oleh karena itu, kerangka perlu diuji pada beberapa tipe kota agar relevansi dan keterbatasannya dapat dipahami secara lebih baik.

Agenda penelitian berikutnya dapat diarahkan pada tiga tahap. Tahap pertama adalah operasionalisasi indikator melalui definisi, satuan pengamatan, dan protokol pengumpulan data. Observasi perilaku dapat digunakan untuk memetakan kelompok pengguna, aktivitas, durasi, dan distribusi waktu. Audit aksesibilitas dapat menilai kontinuitas jalur, hambatan, kemiringan, fasilitas, dan keterhubungan transportasi. Pengukuran mikroklimat serta survei persepsi dapat digunakan secara bersamaan untuk menilai kenyamanan objektif dan subjektif. Wawancara serta pemetaan partisipatif dapat mengungkap identitas, konflik, memori, dan kebutuhan yang tidak terlihat dalam data fisik. Tahap kedua adalah pengujian hubungan antardimensi dengan metode campuran pada beberapa kota menengah. Tahap ketiga adalah evaluasi longitudinal sebelum dan sesudah intervensi untuk mengetahui apakah perbaikan fisik, program aktivitas, serta perubahan pengelolaan benar-benar meningkatkan kepublikan dan kualitas pengalaman.

Pengembangan instrumen harus tetap berhati-hati terhadap kecenderungan menyederhanakan kualitas ruang menjadi peringkat tunggal. Skor dapat membantu perbandingan dan komunikasi, tetapi dapat menyembunyikan konflik nilai serta pengalaman kelompok minoritas. Karena itu, hasil kuantitatif perlu disertai penjelasan kualitatif, peta masalah, dan rekomendasi spesifik. Proses penilaian juga sebaiknya melibatkan pengguna, terutama kelompok

yang sering kurang terwakili, seperti penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, perempuan, pekerja informal, dan masyarakat berpendapatan rendah. Pendekatan tersebut akan menjaga Kerangka RDM sebagai alat refleksi dan pengambilan keputusan, bukan sekadar daftar pemeriksaan teknis. Dengan pengujian yang bertahap dan partisipatif, kerangka ini berpotensi berkembang menjadi instrumen yang dapat digunakan untuk perencanaan, penganggaran, desain, dan evaluasi ruang publik kota menengah Indonesia.

KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa kualitas ruang publik merupakan hasil hubungan antara pemenuhan kebutuhan, kesetaraan penggunaan, dan pemaknaan tempat. Kualitas tidak dapat dinilai hanya melalui luas, jumlah fasilitas, tampilan visual, atau keramaian. Ruang yang berkualitas harus memungkinkan masyarakat hadir, bergerak, beraktivitas, berinteraksi, beristirahat, dan membangun hubungan dengan tempat secara aman serta setara. Kerangka responsive, democratic, dan meaningful menyediakan dasar untuk membaca hubungan tersebut. Dimensi responsif mencakup kenyamanan, keamanan, keragaman aktivitas, dan adaptabilitas. Dimensi demokratis mencakup akses universal, kesetaraan, kebebasan penggunaan, perlindungan hak, dan partisipasi. Dimensi bermakna mencakup identitas, memori, keterikatan, serta kesinambungan sejarah dan budaya. Ketiganya perlu diterapkan bersamaan karena kelemahan satu dimensi dapat menurunkan kualitas keseluruhan.

Hasil sintesis menemukan empat faktor lintas dimensi. Vitalitas temporal memastikan ruang mendukung aktivitas rutin dan temporer pada waktu yang beragam. Integrasi spasial menghubungkan ruang dengan koridor, bangunan, transportasi, fungsi sekitar, dan jaringan ekologis. Ekonomi lokal menyediakan pelayanan, kesempatan penghidupan, serta karakter, tetapi perlu diatur agar tidak mengurangi kepublikan. Pengelolaan kolaboratif menjaga kebersihan, keamanan, fasilitas, kegiatan, dan penyelesaian konflik. Keempat faktor tersebut menunjukkan bahwa kualitas ruang publik bukan produk desain yang selesai ketika pembangunan berakhir. Kualitas dibentuk dan dipertahankan melalui penggunaan serta pengelolaan yang berkelanjutan.

Bagi kota menengah Indonesia, penerapan kerangka perlu mempertimbangkan iklim tropis, penggunaan multifungsi, kegiatan informal, identitas lokal, keterbatasan anggaran, dan kapasitas kelembagaan. Intervensi sebaiknya dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar dan penyelesaian hambatan akses. Pengembangan aktivitas, ekonomi lokal, dan identitas dilakukan setelah sirkulasi, kenyamanan, keselamatan, dan fasilitas dasar memadai. Ruang harus tetap menyediakan kegiatan tanpa kewajiban konsumsi. Sejarah dan budaya perlu diterjemahkan melalui fungsi, narasi, lanskap, dan program, bukan hanya ornamen. Pengelolaan direncanakan sejak awal dengan pembagian tanggung jawab yang jelas.

Ilustrasi Taruna Remaja menunjukkan bahwa persoalan ruang publik dapat muncul secara bersamaan dalam bentuk keterbatasan fasilitas, gangguan akses, lemahnya konektivitas, aktivitas yang tidak merata, kurangnya kenyamanan ekologis, serta identitas yang belum terintegrasi. Kerangka RDM membantu mengorganisasi persoalan tersebut dan menerjemahkannya menjadi prinsip pengembangan kawasan. Meskipun demikian, ilustrasi menggunakan data historis dan tidak membuktikan efektivitas implementasi. Kerangka yang dihasilkan juga masih perlu diuji pada beberapa kota dengan karakter berbeda. Pengujian empiris melalui observasi, survei, audit, pengukuran lingkungan, dan evaluasi tata kelola diperlukan agar indikator dapat dioperasionalkan. Dengan pengembangan tersebut, Kerangka RDM Terintegrasi dapat menjadi dasar konseptual dan praktis bagi penilaian, revitalisasi, serta pengelolaan ruang publik kota menengah Indonesia yang lebih inklusif, kontekstual, dan berkelanjutan.

Tabel 3. Ringkasan Temuan dan Implikasi

No.	Temuan	Implikasi
1	Kualitas ruang publik bersifat multidimensional.	Penilaian perlu menggabungkan kondisi fisik, aktivitas, akses, lingkungan, identitas, ekonomi, dan tata kelola.
2	Responsivitas bergantung pada kesesuaian dengan kebutuhan pengguna.	Prioritaskan kenyamanan, keamanan, pilihan aktivitas, dan adaptabilitas.
3	Demokrasi ruang ditentukan oleh akses aktual dan kesetaraan.	Terapkan akses universal, aturan adil, ruang gratis, dan partisipasi.
4	Kebermaknaan dibentuk oleh hubungan identitas dengan kehidupan sosial.	Hubungkan sejarah dan budaya dengan fungsi, kegiatan, narasi, serta pengalaman.
5	Vitalitas memerlukan distribusi waktu dan lokasi.	Padukan kegiatan rutin dan temporer serta hindari konsentrasi pada satu zona.

No.	Temuan	Implikasi
6	Desain harus terhubung dengan kawasan dan pengelolaan.	Perluas analisis ke koridor, transportasi, fungsi sekitar, pemeliharaan, dan evaluasi.

Sumber: hasil kajian.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan terkait publikasi makalah ini. Seluruh proses penyusunan, analisis, interpretasi, dan penyajian hasil kajian dilakukan secara independen serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan finansial, hubungan pribadi, afiliasi kelembagaan, maupun kepentingan lain yang dapat memengaruhi objektivitas dan keabsahan artikel.

PERNYATAAN PENDANAAN

Penulis menyatakan bahwa penelitian dan publikasi artikel ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga pemerintah, lembaga komersial, maupun organisasi nirlaba. Pernyataan ini harus disesuaikan apabila terdapat lembaga pendukung dan nomor hibah.

REFERENSI

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Carmona, M. (2019). Principles for public space design, planning to do better. *Urban Design International*, 24(1), 47–59. <https://doi.org/10.1057/s41289-018-0070-3>
- Carmona, M. (2021). *Public places urban spaces: The dimensions of urban design* (3rd ed.). Routledge.
- Carr, S., Francis, M., Rivlin, L. G., & Stone, A. M. (1992). *Public space*. Cambridge University Press.
- Chen, L., & Ng, E. (2012). Outdoor thermal comfort and outdoor activities: A review of research in the past decade. *Cities*, 29(2), 118–125. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2011.08.006>
- Dovey, K., & Pafka, E. (2020). What is walkability? The urban DMA. *Urban Studies*, 57(1), 93–108. <https://doi.org/10.1177/0042098018819727>
- El-Kholei, A. O., & Yassein, G. (2022). Professionals' perceptions for designing vibrant public spaces: Theory and praxis. *Ain Shams Engineering Journal*, 13(5), 101727. <https://doi.org/10.1016/j.asej.2022.101727>
- Ewing, R., & Handy, S. (2009). Measuring the unmeasurable: Urban design qualities related to walkability. *Journal of Urban Design*, 14(1), 65–84. <https://doi.org/10.1080/13574800802451155>
- Francis, J., Giles-Corti, B., Wood, L., & Knuiman, M. (2012). Creating sense of community: The role of public space. *Journal of Environmental Psychology*, 32(4), 401–409. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2012.07.002>
- Gehl, J. (2011). *Life between buildings: Using public space*. Island Press.
- Jacobs, J. (1961). *The death and life of great American cities*. Random House.
- Jennings, V., & Bamkole, O. (2019). The relationship between social cohesion and urban green space: An avenue for health promotion. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(3), 452. <https://doi.org/10.3390/ijerph16030452>
- Katherina, L. K. (2014). Tren urbanisasi pada secondary cities di Indonesia periode tahun 1990–2010. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 9(2), 71–80. <https://doi.org/10.14203/jki.v9i2.12>
- Lynch, K. (1960). *The image of the city*. MIT Press.
- Mehta, V. (2014). Evaluating public space. *Journal of Urban Design*, 19(1), 53–88. <https://doi.org/10.1080/13574809.2013.854698>
- Mehta, V., & Mahato, B. (2021). Designing urban parks for inclusion, equity, and diversity. *Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability*, 14(4), 457–489. <https://doi.org/10.1080/17549175.2020.1816563>
- Mitchell, D. (1995). The end of public space? People's Park, definitions of the public, and democracy. *Annals of the Association of American Geographers*, 85(1), 108–133. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1995.tb01797.x>
- Montgomery, J. (1998). Making a city: Urbanity, vitality and urban design. *Journal of Urban Design*, 3(1), 93–116. <https://doi.org/10.1080/13574809808724418>
- Mouratidis, K. (2021). Urban planning and quality of life: A review of pathways linking the built environment to subjective well-being. *Cities*, 115, 103229. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103229>
- Nasution, A. D., & Zahrah, W. (2014). Community perception on public open space and quality of life in Medan, Indonesia. *Procedia—Social and Behavioral Sciences*, 153, 585–594. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.10.091>
- Németh, J. (2009). Defining a public: The management of privately owned public space. *Urban Studies*, 46(11), 2463–2490. <https://doi.org/10.1177/0042098009342903>
- Németh, J., & Schmidt, S. (2011). The privatization of public space: Modeling and measuring publicness. *Environment and Planning B: Planning and Design*, 38(1), 5–23. <https://doi.org/10.1068/b36057>
- Nikolopoulou, M., & Steemers, K. (2003). Thermal comfort and psychological adaptation as a guide for designing urban spaces. *Energy and Buildings*, 35(1), 95–101. [https://doi.org/10.1016/S0378-7788\(02\)00084-1](https://doi.org/10.1016/S0378-7788(02)00084-1)

- Panjaitan, T. W. S., Pojani, D., & Darchen, S. (2022a). Alternative public space: Experiences and lessons from Indonesian cities. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers—Urban Design and Planning*, 175(2), 56–66. <https://doi.org/10.1680/jurdp.21.00005>
- Panjaitan, T. W. S., Pojani, D., & Darchen, S. (2022b). The transformation of public space production and consumption in post-reformation Indonesian cities. *City, Culture and Society*, 29, 100444. <https://doi.org/10.1016/j.ccs.2022.100444>
- Paudel, U., & Pant, K. P. (2023). Understanding vitality of public space: A review with an example of capital city Kathmandu in Nepal. *Land Use Policy*, 133, 106860. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106860>
- Reyes-Riveros, R., Altamirano, A., De La Barrera, F., Rozas-Vásquez, D., Vieli, L., & Meli, P. (2021). Linking public urban green spaces and human well-being: A systematic review. *Urban Forestry & Urban Greening*, 61, 127105. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127105>
- Trancik, R. (1986). *Finding lost space: Theories of urban design*. John Wiley & Sons.
- UNESCO. (2011). *Recommendation on the historic urban landscape, including a glossary of definitions*. UNESCO.
- Varna, G., & Tiesdell, S. (2010). Assessing the publicness of public space: The Star Model of publicness. *Journal of Urban Design*, 15(4), 575–598. <https://doi.org/10.1080/13574809.2010.502350>
- Mokodongan, Elvie Fatmah. (2011). *Peningkatan kualitas ruang terbuka publik di kawasan Taruna Remaja Gorontalo* [Tesis magister, Institut Teknologi Bandung].